



# Trend Korupsi 2012 Semester I

Indonesia Corruption Watch

# Waktu dan Metode Pemantauan

- Pemantauan dilakukan selama periode 1 Januari 2012 – 31 Juni 2012
- Laporan ini disusun berdasarkan data yang bersumber dari media online, termasuk data penanganan kasus yang bersumber dari website aparat penegak hukum
- Kasus korupsi yang dipantau adalah seluruh kasus yang statusnya dalam tahap penyidikan dan aparat penegak (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK) telah menetapkan tersangka yang diduga terlibat.
- Kasus yang dipantau adalah kasus-kasus yang sudah masuk tahap penyidikan (penetapan tersangka) pada periode pemantauan.
- Lingkup tren korupsi terdiri atas : Sektor, Modus, Pelaku (aktor), kerugian, wilayah, waktu kejadian dan lembaga.

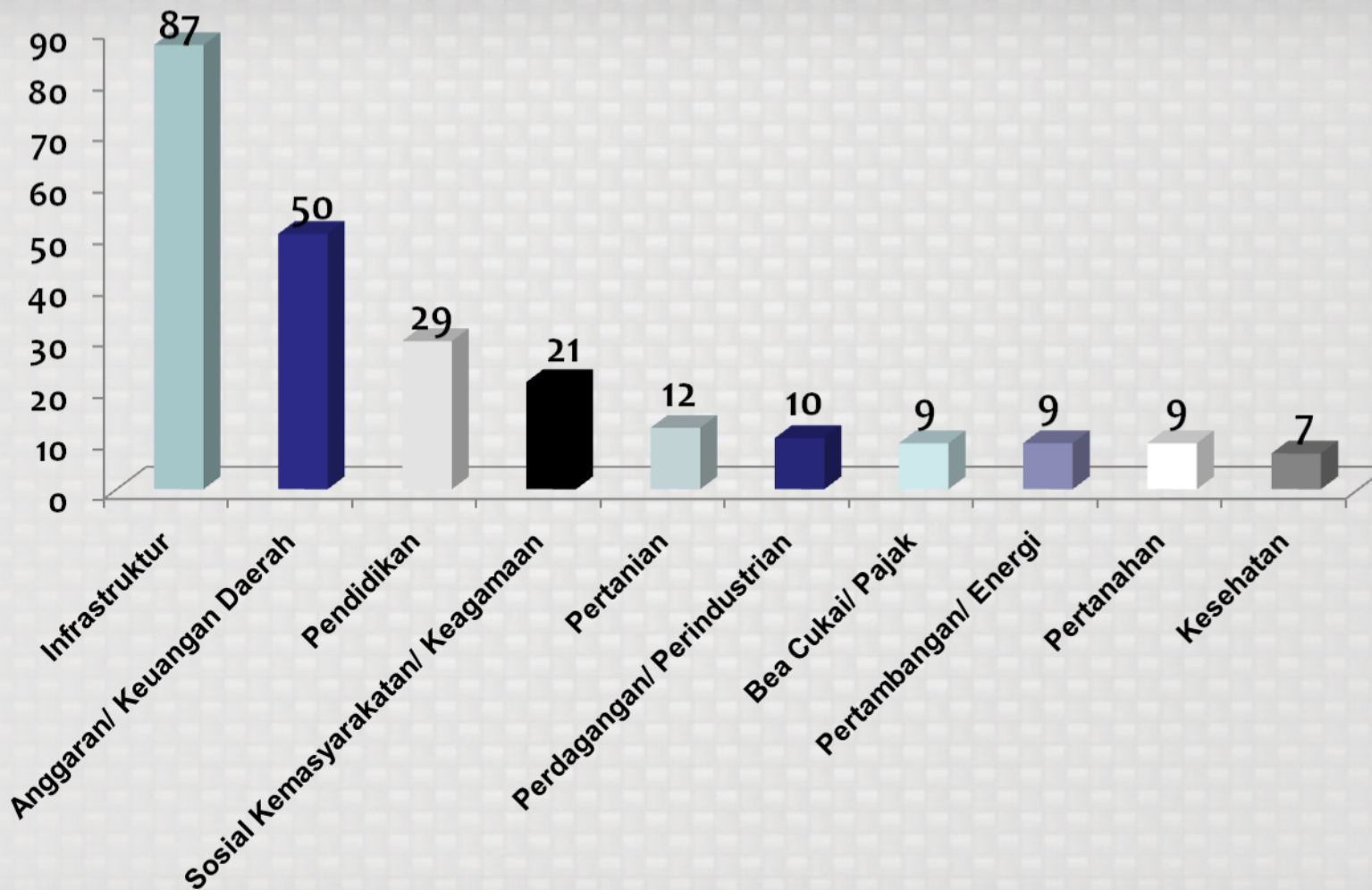
# Temuan Umum Semester I Tahun 2012

- Selama periode 1 Januari – 31 Juli 2012 ditemukan **285 kasus korupsi** yang terjadi baik di pusat maupun daerah.
- Aktor yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum **sebanyak 597 orang**.
- Sedangkan potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi tersebut sebesar **Rp 1,22 triliun**.

# Perbandingan Penindakan Kasus Korupsi (semester 1 2010, tahun 2011 dan semester 1 tahun 2012

	Sem I 2010	Tahun 2011	Sem I 2012
Jumlah kasus	176 kasus	436 kasus	285 kasus
Kerugian Negara	Rp 2,1 triliun	Rp 2,1 triliun	Rp 1,22 triliun
Jumlah Tersangka	441 tersangka	1053 tersangka	597 Tersangka

## Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor



# Catatan

- Pada Semester I tahun 2012, kasus korupsi tertinggi terjadi di sektor infrastruktur (87 kasus), Diikuti keuangan daerah (50 kasus) dan pendidikan (29 kasus). Kemudian di ikuti sektor-sektor lain seperti tercantum dalam grafik 1.
- Kasus korupsi di sektor infrastruktur tahun 2012 hampir serupa dengan tahun 2010, sedangkan di tahun 2011 tidak banyak muncul.
- Sektor korupsi yang konsisten selalu muncul adalah keuangan daerah dimana sejak tahun 2010, rata-rata kasus yang muncul di sektor ini berjumlah 50-an kasus.
- Untuk kasus korupsi pada sektor pendidikan, sebagian besar merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang melibatkan M. Nazarudin. Yang tersebar di beberapa Universitas

# Analisis

- Berulangnya kasus korupsi berdasarkan sektor menunjukkan agenda pemberantasan korupsi belum memberikan pengaruh yang signifikan.
- Aparat penegak hukum masih fokus pada sektor yang konvensional. Meskipun demikian, APH juga telah memulai menangani kasus-kasus korupsi pada sumberdaya alam (tambang, migas, erkebunan dan kehutanan)

# Temuan : Penegak hukum mulai tangani kasus korupsi di Sumber daya alam

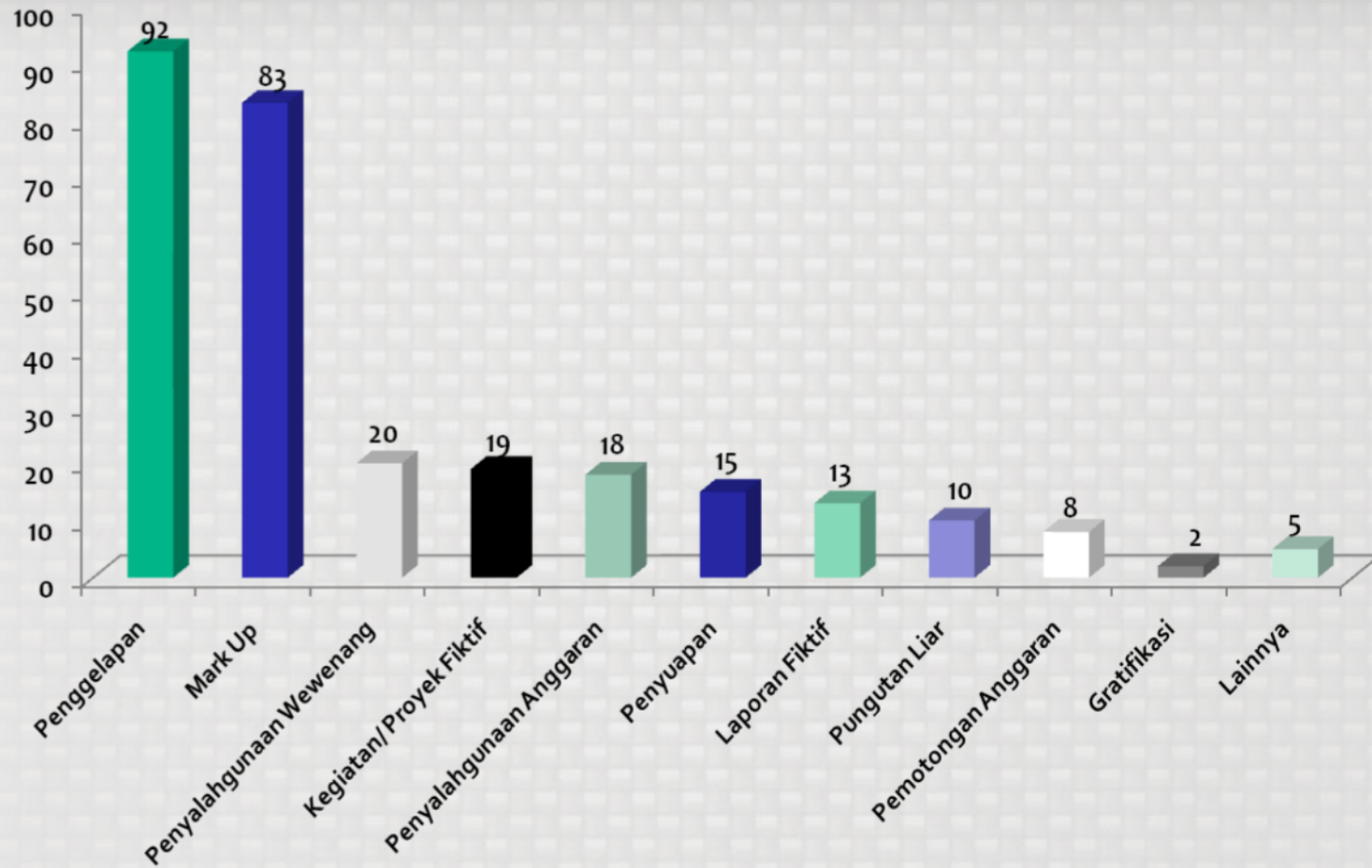
1. Kasus Korupsi Penerbitan lahan tambang batu bara yang dikelola perusahaan tambang PT PPCI di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kejasaan menetapkan tersangka Bupati dan Kepala Dinas karena menerbitkan izin pertambangan.
2. Dugaan korupsi proyek bioremediasi yang dilakukan Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) terhadap tanah tambang hasil eksplorasi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI), ditangani kejaksanaan, kerugian negara mencapai 200 miliar.
3. Korupsi dalam proyek pengadaan bibit dan penanaman pohon koli di Kabupaten Maluku Barat Daya, kejaksanaan menetapkan tersangka mantan kepala dinas dan PPTK, dengan keruian negara 600 juta
4. Kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus dana reboisasi tahun anggaran 2004 dan 2005 di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, kejaksanaan menetapkan kepala dinas kehutanan sebagai tersangka
5. Kasus dugaan suap dari perusahaan tambang kepada kepala kantor pelayanan pajak pratama bogor yang ditangani oleh KPK.
6. Kasus dugaa korupsi pemberian izin kuasa pertambangan, kejaksanaan menjerat walikota banjarmasin dan bupati tanah laut.



## 5 Besar kasus dengan potensi kerugian negara terbesar

1. Dugaan korupsi proyek bioremediasi yang dilakukan Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) terhadap tanah tambang hasil eksplorasi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI), ditangani kejaksaan dengan potensi kerugian negara 200 Miliar.
2. Kasus dugaan korupsi Proyek Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Dinas PU (Pekerjaan Umum) Deli Serdang, ditangani kejaksaan dengan kerugian negara 80 Miliar.
3. Dugaan korupsi kasda kabupaten Mojokerto, ditangani kejaksaan dengan kerugian neara 61 Miliar
4. Dugaan korupsi peralatanlaboratorium dan mebelair Universitas Sriwijaya (Unsri) 2010, ditangani kejaksaan dengan potensi kerugian negara 47 Miliar
5. kasus pengadaan Outsourcing Roll Out-Customer Information System- Rencana Induk sistem Informasi (CIS-RISI) PLN tahun anggaran 2004-2008, ditangani KPK dengan kerugian negara 46,18 Miliar

### Kasus Korupsi Berdasarkan Modus



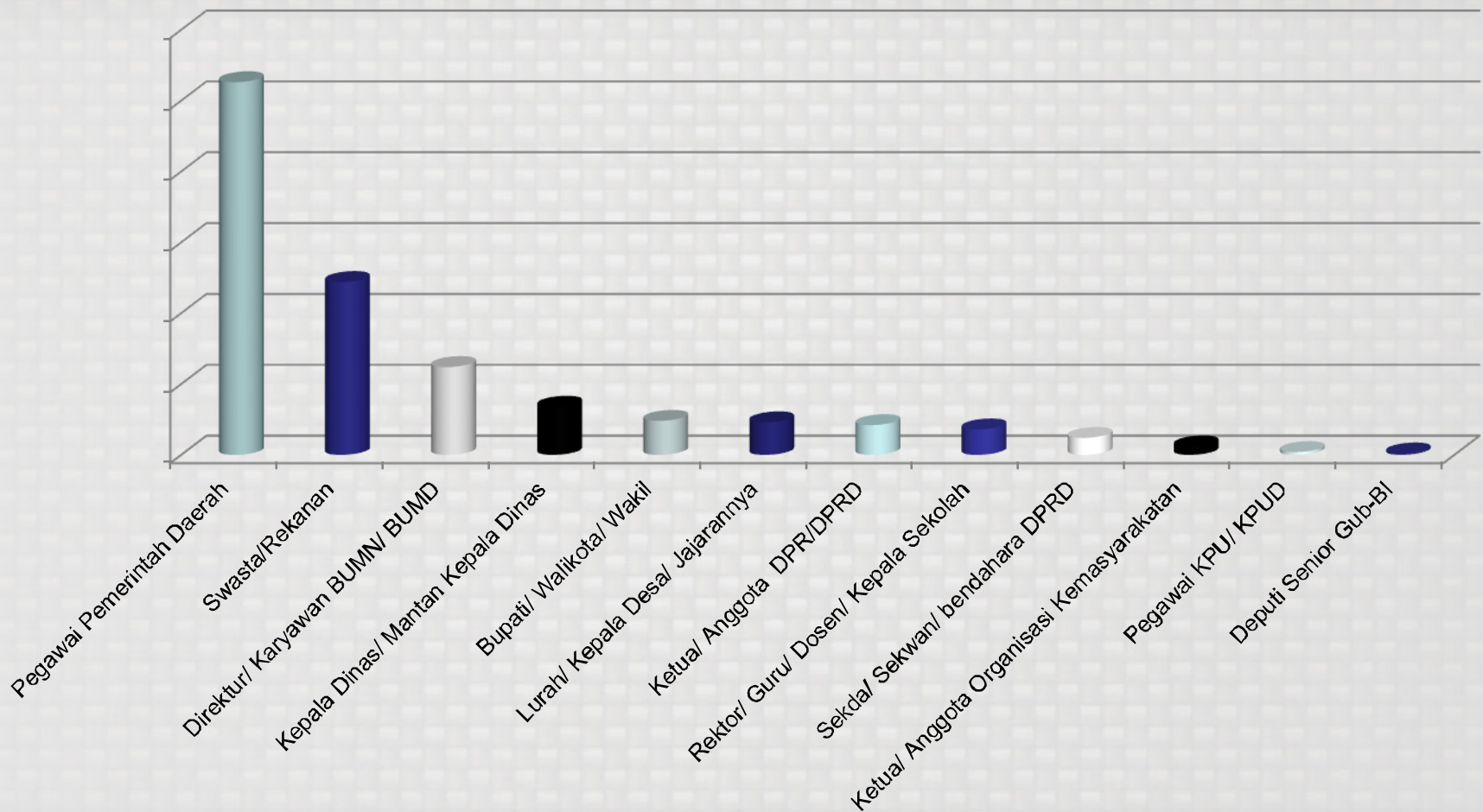
# Catatan

- Berdasarkan hasil pemantauan, modus korupsi yang paling dominan di tahun ini adalah Penggelapan dengan (92 kasus), diikuti modus mark up (83 kasus) dan Penyalahgunaan wewenang (20 kasus).
- Adanya konsistensi sejak tahun 2010 dimana penggelapan menjadi modus korupsi yang paling sering muncul atau ditangani oleh aparat penegak hukum.
- Modus korupsi lain yang terus konsisten muncul adalah mark up (penggelembungan harga). Umumnya kasus dengan modus ini terkait dengan kegiatan pengadaan barang/ jasa
- Tidak hanya KPK, kejaksaan pun sudah mulai menangani kasus bermodus penyuapan.

## 5 besar kasus bermodus penggelapan

1. Kasus korupsi proyek pengadaan Al Quran di Kementerian Agama tahun anggaran 2011-2012, ditangani KPK dengan kerugian negara 35 Miliar.
2. Kasus pembobolan Bank Jateng Syariah (BJS), ditangani kejaksaan, potensi kerugian negara 25, 2 Miliar
3. Dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Prov. Sumatera Utara, ditangani kejaksaan dengan Potensi kerugian negara 25 Miliar
4. Dugaan korupsi proyek pembangunan rumah guru terpencil fiktif di Aceh. Ditangani kejaksaan dengan potensi kerugian negara mencapai 20,1 Miliar
5. Dugaan korupsi pajak dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Papua Barat, ditangani kejaksaan dengan Potensi kerugian negara mencapai 18 Miliar

# 7. Akurasi Laporan Conflictor 1 2012



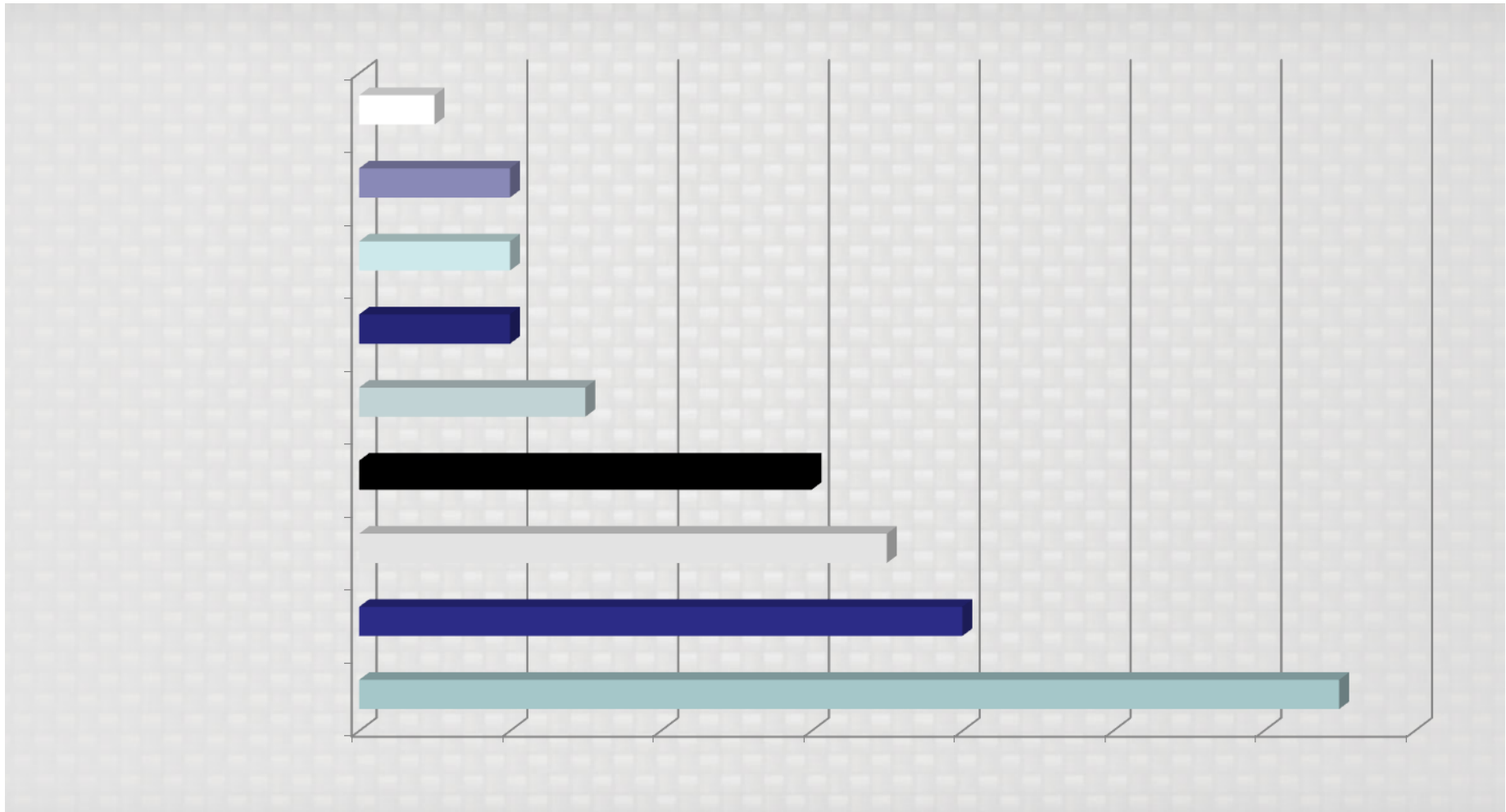
## Catatan

- Berdasarkan hasil pemantauan terhadap aktor yang telah ditetapkan tersangka oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) selama semester 1 tahun 2012, diketahui bahwa dari total 597 tersangka ternyata sejumlah 283 orang merupakan pegawai di level pemerintah daerah. Diikuti oleh tersangka dengan latar belakang swasta/ rekanan (122 orang) dan direktur/karyawan BUMN/BUMD (62 orang).
- Aktor dari kalangan pegawai pemerintah daerah yang terjerat termasuk dalam kategori pegawai rendahan. Jika level kepala dinas hingga kepala daerah digabungkan maka jumlahnya akan semakin besar.

# Catatan

- Secara umum belum banyak perubahan dalam pemberantasan korupsi di daerah. Aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) di daerah masih fokus menjerat aktor “Pegawai Rendahan”. Ada kecenderungan aparat penegak hukum hanya mengejar kuantitas dibanding kualitas.
- Berbeda dengan KPK yang dibatasi mandatnya oleh UU 30/2002, maka lembaga ini cukup banyak menjerat aktor dari elite partai dan pejabat tinggi negara seperti anggota DPRD, Kepala Daerah, DPR, dan Dewan Gubernur Bank Indonesia
- Sepanjang periode pemantauan tidak ada tersangka yang berasal dari penegak hukum

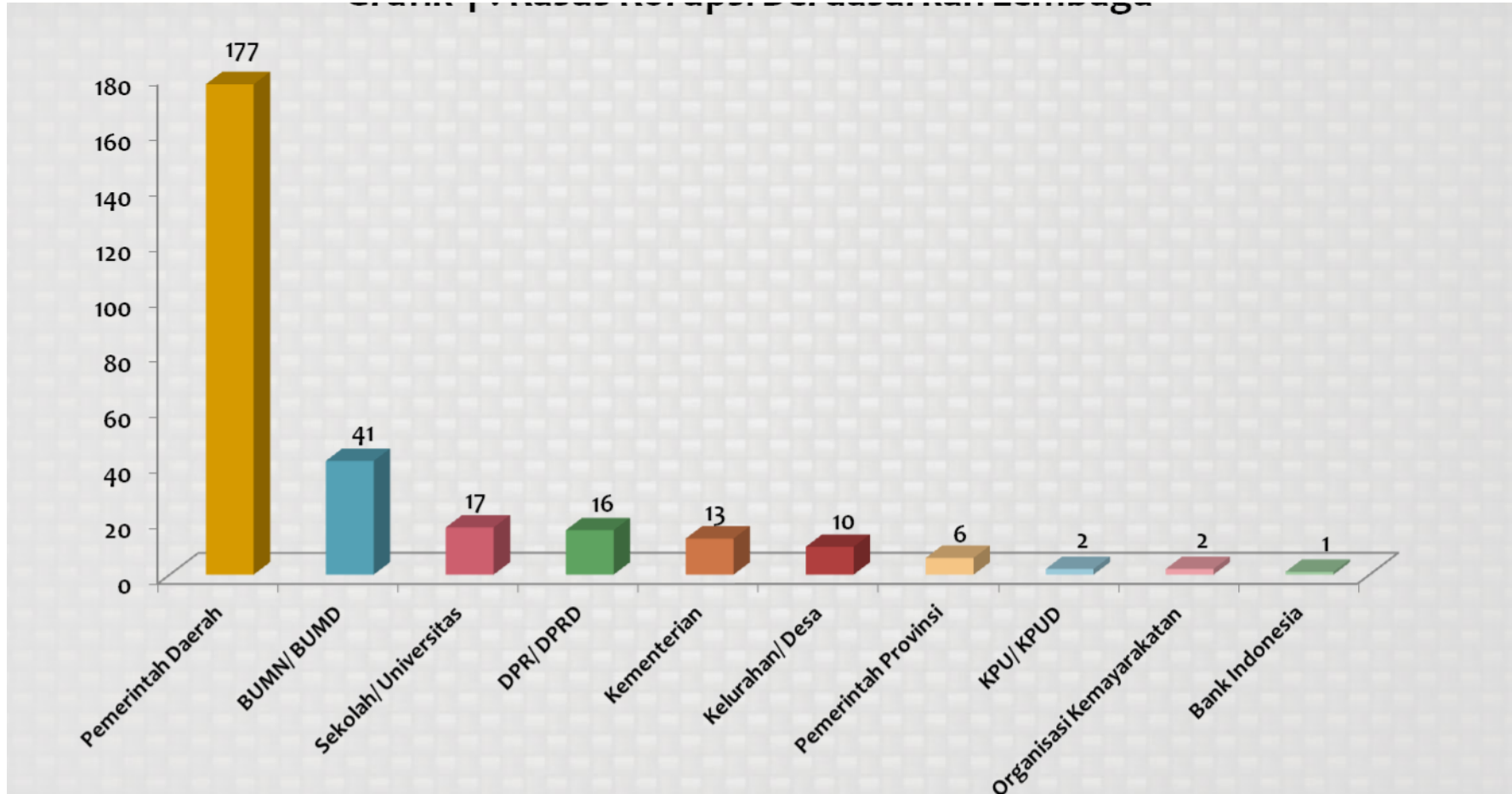
# Struktur Organisasi Perakam & Arsitek Citra





## Catatan

- ICW mencatat terdapat 44 kader partai politik terjerat kasus korupsi. 21 dari kalangan/mantan DPR/D, 21 dari kepala daerah/mantan dan 2 pengurus partai.
- Sepanjang semester 1 tahun 2012, Kader Partai Golkar paling banyak terjerat kasus korupsi (13 Kader). Diposisi kedua, partai demokrat dengan 8 kader dan disusul PDIP dengan 7 Kader.



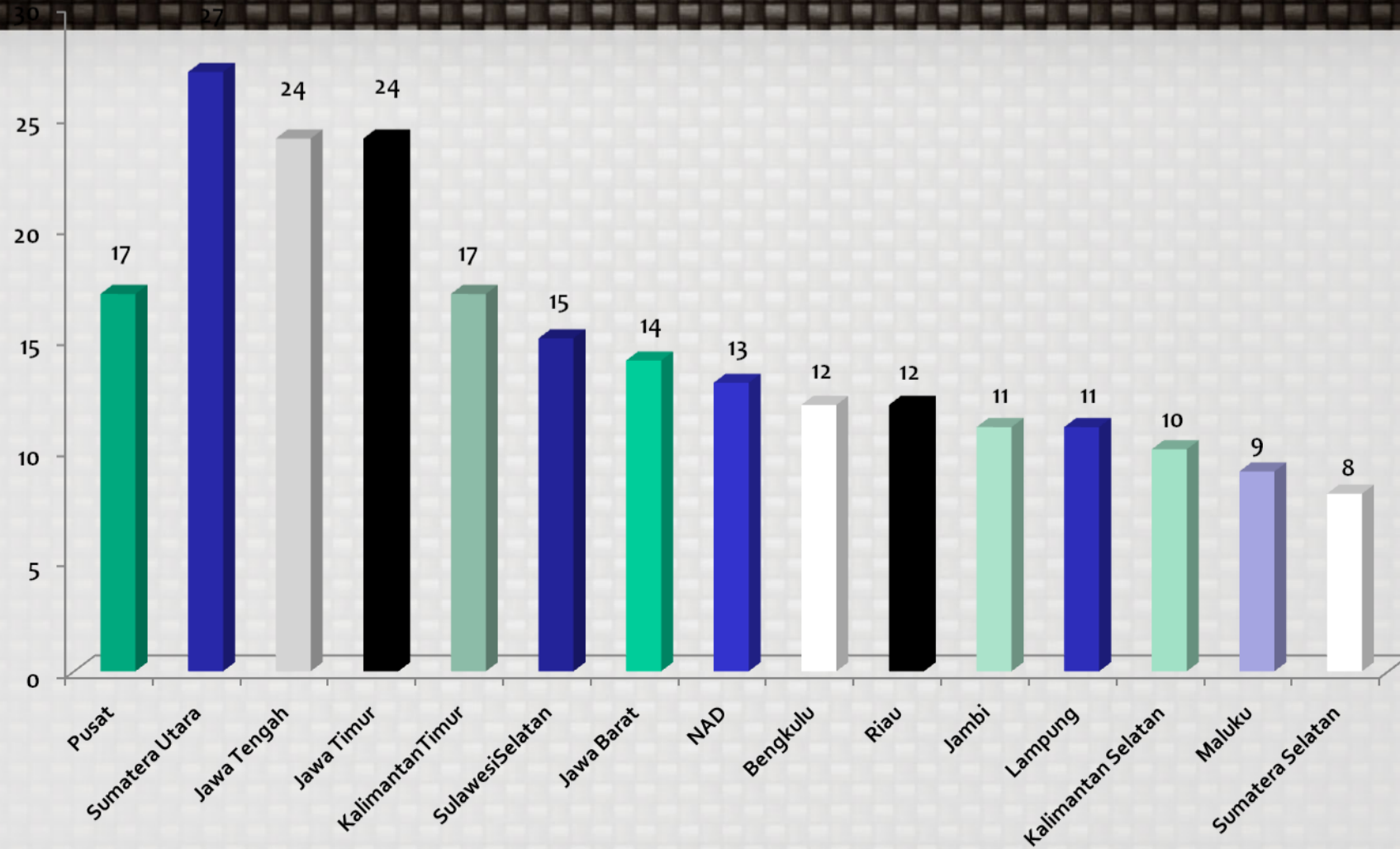
# Catatan

- Bila di tinjau dari lembaga/ institusi terjadi korupsi pada semester 1 2012, Pemerintah daerah merupakan lokus korupsi paling sering terjadi di Indonesia dengan jumlah 177 kasus. Kemudian diikuti dengan BUMN/BUMD (41 kasus) dan sekolah/universitas (17 kasus). Lembaga lain bisa dilihat dalam grafik lembaga terjadinya korupsi.
- Seperti tahun sebelumnya dimana terjadi konsistensi kemunculan kasus korupsi di pada level pemerintah daerah (Kab/kota). Hal ini kemungkinan besar menunjukkan sistem pencegahan di internal pemerintah daerah tidak berjalan efektif

# Catatan

- Potensi kasus korupsi yang terjadi di lembaga BUMN/BUMD juga cukup tinggi dan hampir setiap tahun terjadi. Ini menunjukkan bila profesionalisme pengelolaan BUMN/BUMD terkait penerapan GCG juga belum optimal
- Potensi kasus korupsi disektor pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi juga cukup banyak. Semakin tingginya anggaran pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemburu rente.
- Berbagai kasus pengadaan di beberapa universitas yang melibatkan politisi DPR RI merupakan contoh nyata.

## Kasus Korupsi Berdasarkan Propinsi

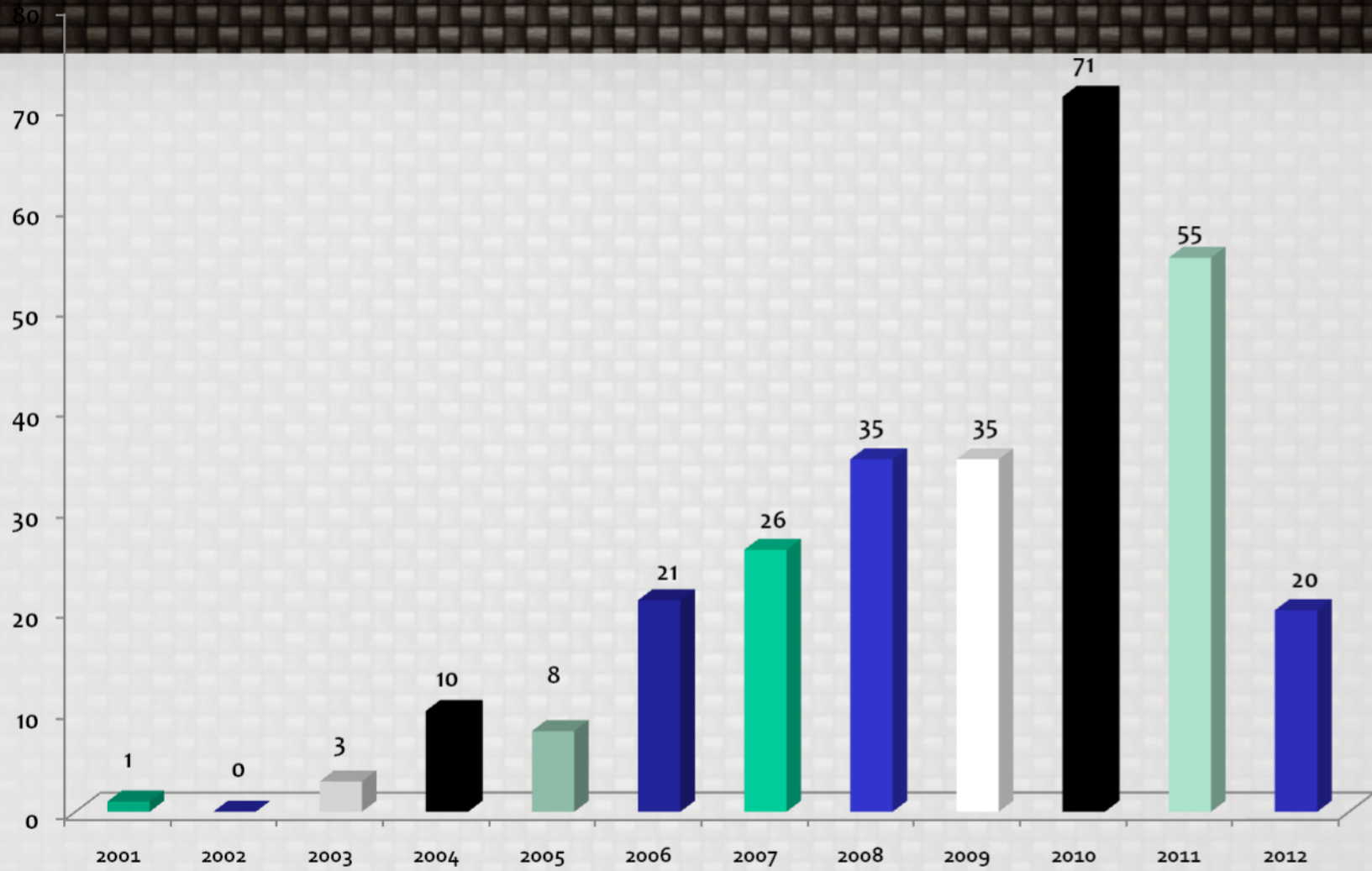


# Catatan

- Menurut pemantauan terhadap wilayah terjadinya korupsi selama semester 1 tahun 2012, Kasus korupsi yang telah masuk pada tahap penyidikan paling banyak terjadi di provinsi Sumatera Utara dengan 27 kasus, diikuti provinsi Jawa Tengah (24 kasus) dan Jawa Timur (24 kasus). Sedangkan jumlah kasus di provinsi lain jumlahnya variatif seperti tercantum dalam grafik 5.
- Potensi kasus korupsi di Sumatera Utara yang sempat menurun di tahun 2011, kembali meningkat di semester 1 2012.
- Sedangkan Jawa Timur menjadi provinsi yang paling kuantitas potensi kasus korupsi cukup konsisten setiap tahun dan jumlahnya relatif tinggi.
- Papua tidak masuk dalam chart, bukan berarti tidak ada korupsi disana, tapi lebih karena lemahnya kinerja APH dalam memproses kasus-kasus korupsi

# Kasus Korupsi Berdasarkan Tahun Kejadian

Kasus Korupsi Berdasarkan Tahun Kejadian

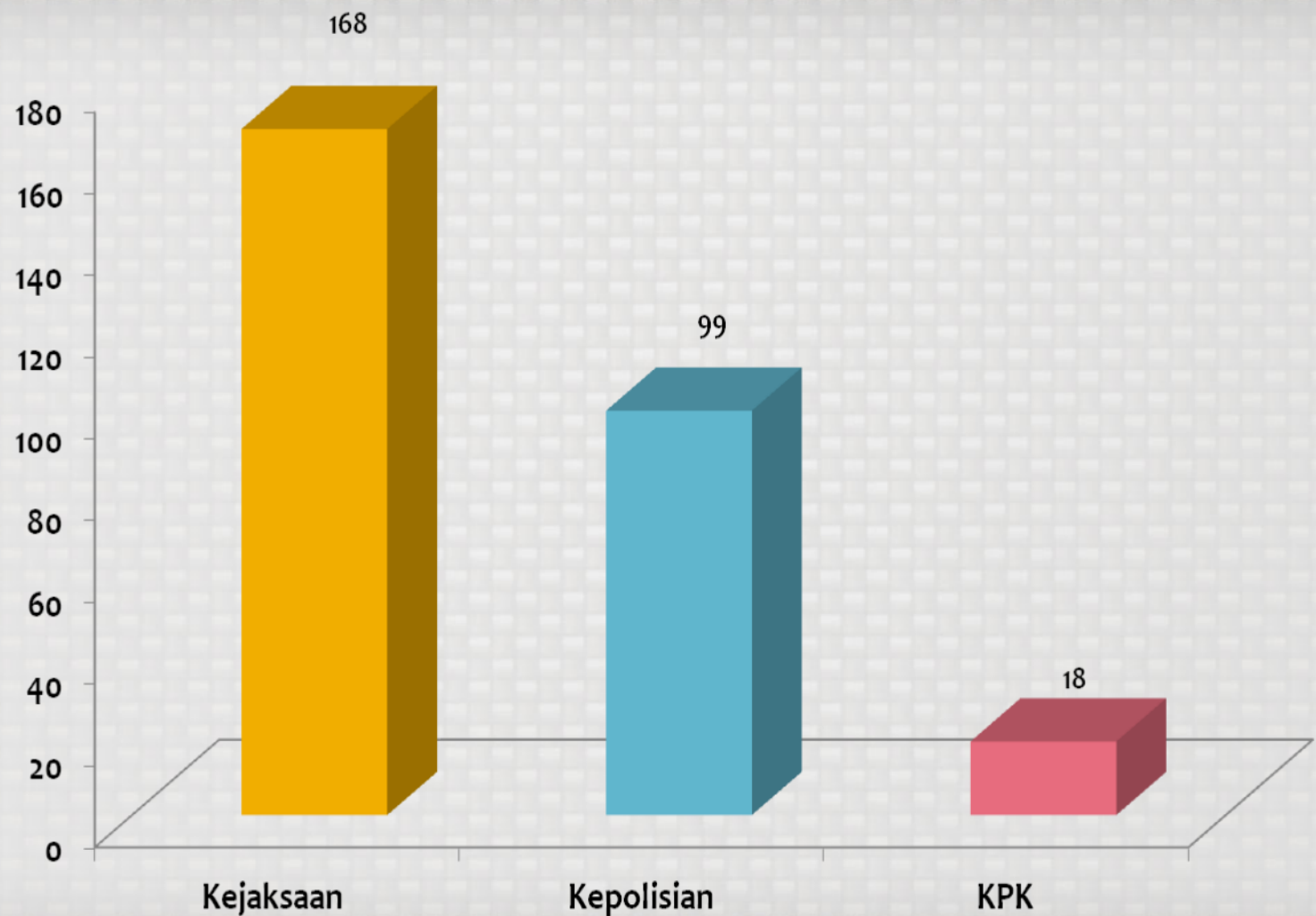


# Catatan

- Jika ditinjau dari waktu, 285 kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum di semester 1 2012 ini, didominasi oleh kasus yang terjadi pada tahun 2010 dengan 71 kasus, diikuti kasus yang terjadi tahun 2011 (55 kasus) dan kasus yang terjadi tahun 2008 dan 2009 (35 kasus). Kasus yang muncul di tahun 2012 dan langsung diproses hingga tahap penyidikan berjumlah 17 kasus.
- Seperti tahun-tahun sebelumnya, indikasi kasus korupsi yang telah berada pada tahap penyidikan di aparat penegak hukum, umumnya merupakan kasus korupsi yang kemunculannya dua tahun sebelumnya.
- Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih kurang responsif dan relatif lamban dalam menangani kasus yang terindikasi korupsi.



Grafik 7 : Kasus Korupsi Berdasarkan Aparat Penegak Hukum Yang Menangani



# Catatan

- Secara kuantitas kasus yang ditangani aparat penegak hukum jumlahnya bervariasi, namun demikian jajaran kejaksaan tetap paling mendominasi penanganan kasus dengan jumlah 168 kasus, diikuti kepolisian dengan 99 kasus dan KPK dengan 18 kasus.
- Meskipun jumlah kasus yang ditangani KPK paling sedikit, namun potensi kerugian negara dari kasus yang ditangani kejaksaan paling besar jumlahnya yaitu Rp 1,5 triliun. Diikuti kasus yang ditangani KPK Rp 600 Miliar dan Kepolisian dengan Rp. 149,4 miliar
- Dari sisi aktor dan metode pengungkapan korupsi, KPK sedikit lebih baik karena terus menjerat aktor high level dengan mengefektifkan kewenangan penyadapan

# Kesimpulan

1. Penegak hukum sudah mulai masuk ke kasus-kasus korupsi pada sektor sumber daya alam seperti tambang, migas, perkebunan dan kehutanan.
2. Sektor korupsi menunjukkan perubahan peringkat/posisi jika dibandingkan dengan semester 2 tahun 2011, infrastruktur kembali menggeser sektor pendidikan diposisi pertama.
3. Jumlah kasus korupsi pada sector BUMN/D dari tahun ketahun menggambarkan angka yang cukup tinggi. penerapan GCG tidak berjalan optimal.
4. Penegak hukum masih cenderung mengungkap kasus-kasus bermodus konvensional seperti penggelapan. Tapi ada poin positif, kendati sedikit, kejaksaan sudah mulai mengungkap kasus bermodus suap.

# Kesimpulan

5. Penegak hukum selain KPK sudah mulai masuk ke ranah korupsi politik, yang menjerat kepala daerah dan anggota DPRD.
6. Kejaksaan paling banyak menetapkan tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dibandingkan KPK dan kepolisian.
7. Pada semester 1 tahun 2012, tidak ada aktor berlatarbelakang penegak hukum dijerat dalam kasus korupsi
8. Kasus-kasus yang muncul sama seperti sebelumnya, sebagian besar kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2010 (2 tahun sebelumnya